

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Wilayah perbatasan di Kecamatan Ketungau Hulu memiliki sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di Kecamatan Ketungau Hulu masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah Negara Malaysia, bahkan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Kabupaten Sintang.

Masih sering terjadi tarik ulur kepentingan, masih sering saling lempar tanggung jawab antara PEMDA, PEMPROV, dan PEMERINTAH PUSAT. Hal tersebut mengakibatkan munculnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah yang langsung berbatasan dengan Malaysia dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga di Malaysia. Permasalahan di perbatasan yang mengakibatkan munculnya banyak kesenjangan pembangunan dengan daerah lain diantaranya adalah:

1. Rendahnya aksesibilitas yang menghubungkan wilayah perbatasan yang tertinggal dan terisolir dengan pusat-pusat pemerintahan dan pelayanan atau wilayah lainnya yang relatif lebih maju

2. Terbatasnya sarana dan prasarana baik pemerintahan, perhubungan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, komunikasi, air bersih dan irigasi, ketenagalistrikan serta pertahanan keamanan.
3. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia karena minimnya sarana pendidikan yang layak.
4. Belum optimalnya pembangunan di wilayah perbatasan Kecamatan Ketungau Hulu oleh pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
5. Belum ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Sehingga masih ada tarik ulur kepentingan dan pemerintah lebih sering untuk saling lempar tanggung jawab.
6. Hentikan penyelewengan dana untuk kawasan perbatasan di Kecamatan Ketungau Hulu, dan hentikan juga pengatas namaan masyarakat perbatasan untuk kepentingan pribadi.

Berikut ini program kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang mencakup pembangunan bidang pekerjaan umum, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian, dan peternakan, bidang perkebunan dan kehutanan, bidang perikanan dan kelautan, bidang telekomunikasi dan perhubungan, bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang perdagangan, serta bidang hankam.⁷⁷

⁷⁷ Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Era Otonomi Daerah

1. Program Pekerjaan Umum/ Sarana dan Prasarana, antara lain meliputi *Pemeliharaan Berkala dan Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan Permukiman, Rehab Rumah Dinas Camat, Pembangunan Sarana Air Bersih/Pipanisasi,*
2. *Program Pendidikan, Kegiatan Pembangunan di bidang pendidikan meliputi Pembangunan Sekolah, Rehab Sekolah, Pembangunan dan Rehab Rumah Dinas Guru, dan Pengadaan Meublier.*
3. Program Kesehatan dan KB, meliputi Pembangunan dan Rehab Puskesmas, Pustu, Plindes dan Rumah Paramedis, serta Pembangunan Laboratorium dan Oxygen Concentrat dan KB.
4. *Program Kehutanan dan Perkebunan, meliputi penyaluran Bibit Karet Unggulan, Pembinaan dan Peningkatan Rehabilitasi Hutan.*
5. *Program Kelautan dan Perikanan, berupa Pembangunan dan Peningkatan Perikanan Rakyat, Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan, Pengembangan Keramba Ikan, Pembangunan Kolam Ikan dan Kolam Pendederan.*

Dari kelima program kerja di atas, yang bertulisan miring merupakan program kerja yang jika kita lihat kenyataan dan kondisi di lapangan dirasa gagal atau bahkan belum dilakukan. Sehingga haruslah dilakukan oleh evaluasi dari pihak pemerintah

4.2. Saran

4.2.1. Infastruktur Publik

Pembangunan dan perbaikan jalan merupakan hal utama dan pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena akses jalanlah yang memang selama ini menjadi kendala utama gagalnya pembangunan di Kecamatan Ketungau Hulu. Masyarakat pun meminta hal yang sama, tidak perlu aspal seperti yang ada di kota-kota besar, cukup dilakukan pengerasan jalan sudah cukup bagi mereka apalagi sampai diaspal. Karena mereka sudah bosan dan lelah dengan kondisi buruknya jalan yang ada, jangan sampai kejadian di Desa Mungguk Gelombang terulang kembali di desa-desa lainnya.

Jangan ada lagi lempar tanggung jawab antar pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jangan gara-gara jalan yang berstatus NON STATUS jalan yang rusak tersebut hanya dibiarkan sampai ada status yang jelas. Tentunya bukan sebuah pelanggaran jika Pemda Sintang melakukan perbaikan jalan tanpa menunggu kejelasan status jalan dari pemerintah pusat. Tentunya akan menjadi sebuah prestasi dan dapat dibanggakan bagi Pemda Sintang dan masyarakatnya.

Jangan sampai persepsi bahwa penanganan kawasan perbatasan hanya domain pemerintah pusat saja harus segera diperbaiki. Karena pemerintah daerah pun punya tanggung jawab dan kewajiban yang lebih besar terhadap masyarakatnya, itulah sebenarnya tujuan utama dari Otonomi Daerah untuk meringankan beban dan tanggung pemerintah pusat. Untuk menjadi sebuah daerah otonom yang mandiri

karena Pemerintah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan sendiri dalam menangani kawasan perbatasan, kewenangan tersebut adalah:⁷⁸

1. Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan.
2. Menjaga dan memelihara tanda batas.
3. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya.
4. Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

4.2.2. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Peningkatan kualitas SDM yang ada di Kecamatan Ketungau Hulu harus diawali dengan peningkatan kualitas tenaga pengajar diutamakan yang merupakan produk (warga) asli daerah perbatasan di Kecamatan Senaning, penyediaan fasilitas penunjang pendidikan yang maksimal, menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Maksimalkan potensi SDM asli daerah, artinya pemberian beasiswa untuk anak-anak sekolah SD, SMP, SMA dan juga yang hendak melanjutkan ke bangku Kuliah terutama mereka yang berkuliah di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan keamanan. Dengan berbekal pengalaman saat masih sekolah di yakini mereka akan memiliki tanggung jawab lebih tinggi terhadap panggilan untuk

memajukan kampung halaman mereka. Karena hampir seluruh siswa kelas XII IPA ataupun IPS menginginkan untuk dapat berkuliah, namun mereka terganjal dengan mahalannya biaya pendidikan.

Kebanyakan dari mereka menginginkan untuk ambil jurusan kesehatan, tapi tidak ada yang berani untuk mengambil Kedokteran karena mahalannya biaya untuk sekolah kedokteran, hanya sebatas sekolah kebidanan atau keperawatan. Sebenarnya di Kabupaten Sintang pemerintah daerah menyediakan beasiswa untuk sekolah Kedokteran di Universitas Tanjungpura Pontianak dan di bidang pemerintahan ada Prodi Ilmu Pemerintahan sejenis IPDN. Kalau tidak salah jumlahnya tiga sampai lima orang pertahun ajaran dan untuk Prodi Ilmu Pemerintahan jumlahnya enam orang pertahun ajaran.

Beasiswa tersebut dapat diperoleh dengan cara mengikuti seleksi, dan sampai saat ini yang mendapatkan hanya dari siswa-siswi yang bersekolah di SMA-SMA favorit yang ada di Sintang. Seharusnya pemerintah daerah mengalokasikan satu atau dua jatah tersebut ke daerah-daerah perbatasan seperti di Kecamatan Ketungau Hulu. Tentunya dengan seleksi yang sama, namun khusus untuk daerah perbatasan. Karena sungguh tidak mungkin mungkin siswa-siswi perbatasan dapat bersaing langsung dengan siswa-siswi di Kota yang secara kualitas, kuantitas dan fasilitas jauh lebih baik.

Jika kita lihat kenyataan yang terjadi, banyak dokter yang ditugaskan ke perbatasan di Kecamatan Ketungau Hulu tidak memiliki kemampuan

tinggi, hal ini dibuktikan dengan jarang mereka ada ditempat dan lebih sering berada di Sintang. Walaupun memang ada sumpah bakti dokter, namun karena mereka bukan asli daerah tersebut banyak yang mengajukan cuti bahkan pindah. Harapan terakhir tentunya ada ditangan putra-putri asli daerah yang akan kembali untuk membangun kampung halaman mereka yang tentunya harus didukung dengan penyediaan dan penambahan fasilitas kesehatan.

Hanya ada sebuah puskesmas dan seorang dokter tidak akan mampu untuk melayani lebih dari 20.000 masyarakat yang ada di Kecamatan Senaning. Ditambah lagi akses untuk menuju puskesmas tidaklah mudah, banyak masyarakat yang berjalan kaki hanya untuk sekedar berobat di ibu kota kecamatan Senaning. Melihat realita yang ada seharusnya pemerintah daerah bekerja sama dengan dinas kesehatan membangun sebuah rumah sakit di Kecamatan Ketungau Hulu, penambahan tenaga medis terutama dokter, penyediaan mobil ambulans dan juga penambahan mobil puskesmas keliling. Semua itu harus dan segera dilakukan sebagai upaya menyediakan pelayanan kesehatan yang maksimal, sehingga anggapan ORANG MISKIN DILARANG SAKIT tidak terjadi di Kecamatan Ketungau Hulu.

4.2.3. Bidang Keamanan

Sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah perbatasan peningkatan kualitas penjagaan keamanan harus terus dilakukan. Walaupun untuk saat ini kondisi keamanan di kawasan perbatasan di Kecamatan Ketungau Hulu

terbilang aman, namun untuk menuju menjadi daerah perbatasan sebagai BERANDA DEPAN Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai kawasan perbatasan di Kecamatan Ketungau Hulu justru menjadi HALAMAN BELAKANG Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dengan tingkat kriminalitas dan penyelundupan yang tinggi, menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya gerakan-gerakan separatism. Oleh karena itu untuk mewujudkan kondisi keamanan yang kondusif, hal yang harus dilakukan sekarang adalah:

1. Perbaikan dan penambahan asrama polisi
2. Penambahan personil sesuai yang dibutuhkan sebanyak 90 personil
3. Penambahan fasilitas dan perlengkapan penunjang penjagaan dan keamanan. Seperti :
 - 1) HT Trasmiter sebagai alat komunikasi, dimana saat ini masih meminjam milik warga.
 - 2) Senjata api dan alat pengamanan lainnya.
 - 3) Kendaraan dinas sebagai penunjang pengamanan ke desa-desa di perbatasan.
4. Pemberian tunjangan kawasan khusus perbatasan yang selama ini tidak atau belum pernah mereka dapatkan.
5. Rekrutmen atau penerimaan dan penempatan personil asli daerah-daerah

6. Meningkatkan kerja sama dan juga koordinasi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan di kawasan perbatasan.
7. Meningkatkan intensitas patroli di sepanjang garis perbatasan, secara berkelanjutan. Baik itu patroli rutin, atau patrol bersama TNI dan Polisi di Raja Malaysia.

4.2.4. Saran Untuk Pemerintah Terkait.

1. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan harus segera dilaksanakan khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur jalan guna mendukung pembangunan di bidang lainnya, baik itu pendidikan, keamanan, kelistrikan dan terakhir di bidang ekonomi apalagi ketergantungan masyarakat perbatasan sangat tinggi terhadap Negara Malaysia. Sehingga dikhawatirkan akan melunturkan rasa nasionalisme warga masyarakat perbatasan.
2. Untuk BNPP hendaknya berkantor di Kecamatan Ketungau Hulu agar lebih memahami kondisi dan keadaan di wilayah perbatasan. Karena selama ini lebih sering mengundang masyarakat untuk datang ke pusat.
3. Berhentilah untuk saling melempar tanggung jawab, lebih baik lakukan koordinasi lebih baik untuk bekerja sama membangun kawasan perbatasan di Kecamatan Ketungau Hulu.
4. Untuk Pemerintah Kabupaten Sintang untuk meninjau ulang, atau setidaknya tunda upaya untuk membentuk Provinsi Karawang Baru. Dan

berfokuslah pada pembangunan dan perhatian anda pada masyarakat yang ada di perbatasan di Kecamatan Ketungau Hulu. karena jika Provinsi KPR terbentuk ada tiga wilayah perbatasan yang akan bergabung, yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Untuk anggota DPRD Kabupaten Sintang yang berasal dari Kecamatan Ketungau Hulu ataupun dari dapil di Kecamatan Ketungau Hulu agar dapat lebih sensitif mendengar keluhan masyarakatnya, dan dapat melakukan sesuatu yang lebih dan lebih